LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

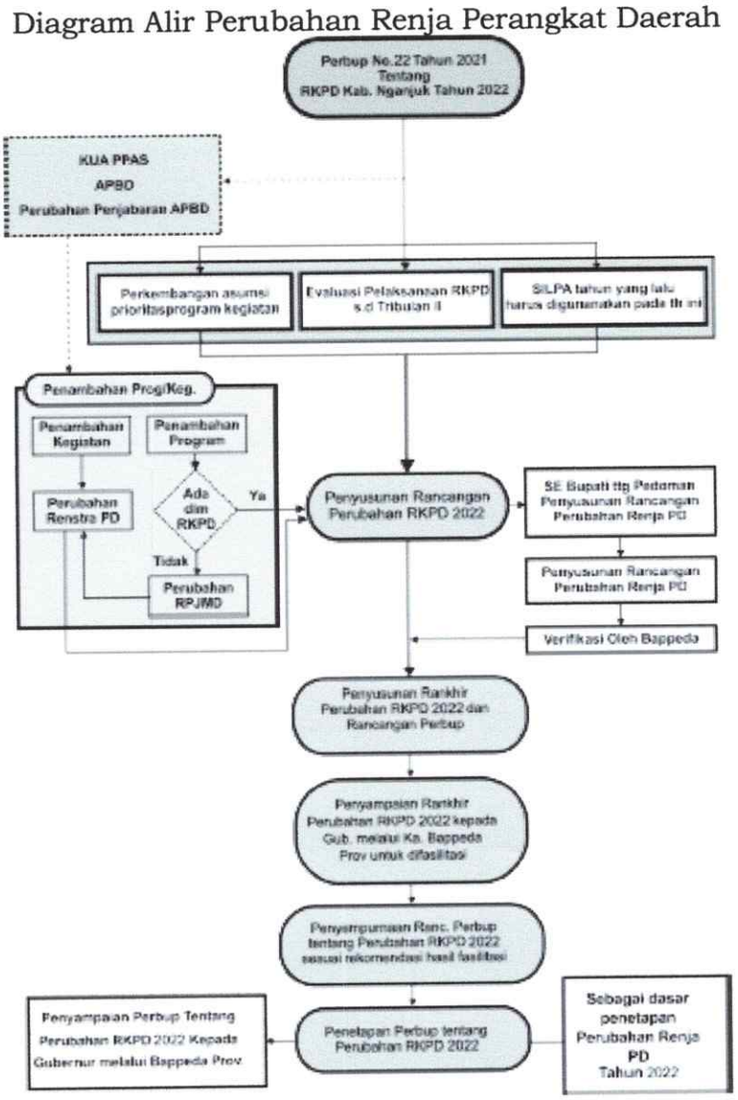
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.
Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2024, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentangAlat_Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan tera ulang UTTP;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2. I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya produktivitas perindustrian																								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	57	%	1.400.000.000	83,34	%	800.791.050	57	%	323.355.000	0	%	-	0	%	-	83	%	800.791.050	1,46	0,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	8	Dokumen	1.400.000.000	4	Dokumen	800.791.050	7	Dokumen	323.355.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	800.791.050	0,50	0,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	2	Dokumen	305.000.000	2	Dokumen	150.236.000	1	Dokumen	56.220.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	150.236.000	1,00	0,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2	Dokumen	850.000.000	3	Dokumen	547.792.550	2	Dokumen	103.450.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	547.792.550	1,50	0,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	90.000.000				1	Dokumen	127.890.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan							2	Dokumen	35.795.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	79	%	205.000.000	77,6	%	30.778.720	79	%	63.972.000	17,95	%	6.632.607	17,95	%	6.632.607	96	%	37.411.327	1,21	0,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		3.31.03.2.01	**Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Dokumen	205.000.000	6	Dokumen	30.778.720	33	Dokumen	63.972.000	2	Dokumen	6.632.607	2	Dokumen	6.632.607	8	Dokumen	37.411.327	0,22	0,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	8	Dokumen	205.000.000	7	Dokumen	30.778.720	7	Dokumen	63.972.000	2	Dokumen	6.632.607	2	Dokumen	6.632.607	9	Dokumen	37.411.327	1,13	0,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	25	%	310.000.000	25,12	%	51.920.420	25	%	134.326.000	6,25	%	5.664.607	6,25	%	5.664.607	31	%	57.585.027	1,25	0,19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.04.2.01	**Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	310.000.000	1	Dokumen	51.920.420	4	Dokumen	134.326.000	0	Dokumen	5.664.607	0	Dokumen	5.664.607	1	Dokumen	57.585.027	0,20	0,19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas	2	Dokumen	185.000.000	1	Dokumen	33.350.420	2	Dokumen	43.536.000	0	Dokumen	5.664.607	0	Dokumen	5.664.607	1	Dokumen	39.015.027	0,50	0,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan	2	Dokumen	125.000.000	1	Dokumen	18.570.000	2	Dokumen	90.790.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	18.570.000	0,50	0,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
			lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas																					
		3.31.01	**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP DISPERINDAG	85,4	Nilai	36.228.517.451	180,96	Nilai	10.319.458.262	85,3	Nilai		0	Nilai	1.097.790.588	0	Nilai	1.097.790.588	181	Nilai	11.417.248.850	2,12	0,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Dokumen	315.000.000	13	Dokumen	113.260.640	17	Dokumen	49.094.590	13	Dokumen	4.900.000	13	Dokumen	4.900.000	26	Dokumen	118.160.640	1,44	0,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	165.000.000	9	Dokumen	34.634.400	17	Dokumen	37.918.000	10	Dokumen	4.900.000	10	Dokumen	4.900.000	19	Dokumen	39.534.400	3,80	0,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	90.000.000	4	Laporan	27.700.820	4	Laporan	6.754.350	0	Laporan		0	Laporan		4	Laporan	27.700.820	1,00	0,31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	60.000.000	6	Laporan	50.925.420	4	Laporan	4.422.240	3	Laporan		3	Laporan		9	Laporan	50.925.420	1,13	0,85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104	Dokumen	29.144.682.451	93	Dokumen	7.767.241.749	104	Dokumen	8.824.089.118	23	Dokumen	976.066.442	23	Dokumen	976.066.442	116	Dokumen	8.743.308.191	1,12	0,30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	orang/bulan	28.837.518.451	262	orang/bulan	7.662.602.709	70	Orang/bulan	8.766.213.118	62	orang/bulan	967.736.442	62	orang/bulan	967.736.442	324	orang/bulan	8.630.339.151	4,32	0,30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	Dokumen	153.040.000	110	Dokumen	49.199.750	60	Dokumen	49.980.000	19	Dokumen	8.330.000	19	Dokumen	8.330.000	129	Dokumen	57.529.750	2,15	0,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	18.324.000	1	Laporan	882.750	1	Laporan	2.632.000	1	Laporan		1	Laporan	-	2	Laporan	882.750	2,00	0,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	Laporan	135.800.000	36	Laporan	54.556.540	25	Laporan	5.264.000	3	Laporan		3	Laporan	-	39	Laporan	54.556.540	1,56	0,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Dokumen	1.611.435.000	2	Dokumen	970.340.372	4	Dokumen	952.864.980	0	Dokumen	17.852.300	0	Dokumen	17.852.300	2	Dokumen	988.192.672	0,50	0,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	Paket	12.500.000	34	Paket	14.344.000	10	Paket	8.998.400	3	Paket	1.548.200	3	Paket	1.548.200	37	Paket	15.892.200	0,74	1,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	575.000.000	12	Paket	90.471.740	8	Paket	60.958.180	2	Paket	1.550.600	2	Paket	1.550.600	14	Paket	92.022.340	1,17	0,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	21.335.000	7	Paket	628.972.600	12	Paket	635.743.900	2	Paket	2.250.000	2	Paket	2.250.000	9	Paket	631.222.600	0,75	29,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	22.600.000	11	Dokumen	5.550.000	12	Dokumen	6.000.000	1	Dokumen	1.110.000	1	Dokumen	1.110.000	12	Dokumen	6.660.000	1,00	0,29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	110.000.000	12	Laporan	30.201.230	4	Laporan	29.062.500	0	Laporan		0	Laporan	-	12	Laporan	30.201.230	1,00	0,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	570.000.000	12	Laporan	170.901.552	4	Laporan	212.102.000	0	Laporan	11.393.500	0	Laporan	11.393.500	12	Laporan	182.295.052	1,00	0,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	Unit	3.132.000.000	127	Unit	501.304.000	12	Unit	321.174.005	0	Unit	-	0	Unit	-	127	Unit	501.304.000	18,14	0,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	66	Unit	380.000.000	101	Unit	34.700.000	4	Unit	7.200.000	0	Unit	-	0	Unit	-	101	Unit	34.700.000	1,53	0,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	29	Unit	792.000.000	49	Unit	395.310.000	25	Unit	313.974.005	0	Unit	-	0	Unit	-	49	Unit	395.310.000	1,69	0,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa**	Jumlah Laporan	4	Laporan		1	Laporan		4	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		1	Laporan		0,25	0,4	Dinas Perindustrian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			879.000.000			333.376.714			648.239.812			92.452.142			92.452.142			425.828.856		8	dan Perdagangan
		3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	9.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	0	Laporan		0	Laporan		1	Laporan	4.000.000	1,00	0,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	675.000.000	1	Laporan	236.246.294	1	Laporan	381.907.812	0	Laporan	60.149.895	0	Laporan	60.149.895	1	Laporan	296.396.189	1,00	0,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	195.000.000	1	Laporan	93.130.420	1	Laporan	261.332.000	0	Laporan	32.302.247	0	Laporan	32.302.247	1	Laporan	125.432.667	1,00	0,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7	Unit	622.000.000	40	Unit	378.350.637	7	unit	176.341.200	6	Unit	6.519.704	6	Unit	6.519.704	46	Unit	384.870.341	6,57	0,62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	160.000.000	4	Unit	74.563.477	1	Unit	64.620.000	1	Unit	4.667.792	1	Unit	4.667.792	5	Unit	79.231.269	5,00	0,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	200.000.000	84	Unit	54.590.479	24	Unit	79.176.200	3	Unit	1.851.912	3	Unit	1.851.912	87	Unit	56.442.391	5,44	0,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50	Unit	27.000.000	2	Unit	9.999.000	10	Unit	4.995.000	0	Unit		0	Unit	-	2	Unit	9.999.000	0,04	0,37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	Unit	75.000.000	53	Unit	12.800.000	20	Unit	27.550.000	2	Unit		2	Unit	-	55	Unit	12.800.000	2,20	0,17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01 .2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1	Dokumen	24.400.000	0	Dokumen	5.651.000	1	Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	5.651.000	0,00	0,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Laporan	24.400.000	1	Laporan	5.651.000	18	Laporan	6.826.000	0	Laporan		0	Laporan	-	1	Laporan	5.651.000	1,00	0,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan																								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	90	%	305.069.000	100	%	148.904.920	90	%	51.006.000	8	%	4.614.607	8	%	4.614.607	108	%	153.519.527	1,20	0,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase penerbitan TDG	90	%	297.569.000	19,23	%	135.514.920	90	%	34.956.000	8	%	4.614.607	8	%	4.614.607	27	%	140.129.527	0,30	0,47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	27	Dokumen	297.569.000	5	Dokumen	135.514.920	25	Dokumen	34.956.000	2	Dokumen	4.614.607	2	Dokumen	4.614.607	7	Dokumen	140.129.527	0,26	0,47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses	2	Dokumen	7.500.000			13.390.000	2	Dokumen	16.050.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	13.390.000	0,00	1,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	Dokumen	7.500.000			13.390.000	2	Dokumen	16.050.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	13.390.000	0,00	1,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Omzet Perdagangan	1089	Milyar	19.359.499.224	1439	Milyar	6.590.431.879	1089	Milyar	5.286.053.000	0	Milyar	721.045.846	0	Milyar	721.045.846	1439	Milyar	7.311.477.725	1,32	0,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	24	Unit	17.970.143.624	0	Unit	6.326.099.624	8	unit	5.012.284.000	0	Unit	698.453.862	0	Unit	698.453.862	0	Unit	7.024.553.486	0,00	0,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6	Unit	17.970.143.600	7	Unit	6.326.099.624	6	Unit	5.012.284.000	0	Unit	698.453.862	0	Unit	698.453.862	7	Unit	7.024.553.486	1,17	0,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana**	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola	35	Pasar	1.389.355.60	35	Pasar	264.332.255	35	Pasar	273.769.000	35	Pasar	22.591.984	35	Pasar	22.591.984	70	Pasar	286.924.23	2,00	0,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
			Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan			0															9			
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1.389.355.600	1	Dokumen	264.332.255	1	Dokumen	273.769.000	0	Dokumen	22.591.984	0	Dokumen	22.591.984	1	Dokumen	286.924.239	1,00	0,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	96	%	863.846.600	100	%	100.839.165	96	%	132.781.000	30	%	4.614.607	30	%	4.614.607	130	%	105.453.772	1,35	0,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	4	Laporan	564.121.600	3	Laporan	41.570.165	4	Laporan	61.031.000	1	Laporan	4.614.607	1	Laporan	4.614.607	4	Laporan	46.184.772	1,00	0,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4	Laporan	204.121.600	4	Laporan	36.551.165	4	Laporan	36.526.000	1	Laporan	4.614.607	1	Laporan	4.614.607	5	Laporan	41.165.772	1,25	0,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	Laporan	360.000.000	2	Laporan	5.019.000	2	Laporan	24.505.000	1	Laporan		1	Laporan		3	Laporan	5.019.000	1,50	0,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	299.725.000	3	Laporan	59.269.000	4	Laporan	71.750.000	1	Laporan		1	Laporan		4	Laporan	59.269.000	1,00	0,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan	4	Laporan	299.725.000	4	Laporan	59.269.000	4	Laporan	71.750.000	1	Laporan		1	Laporan		5	Laporan	59.269.000	1,25	0,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
				realisasi minimal 90%																					
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	60	%	400.000.000	50	%	88.882.600	60	%	86.492.000	0	%		0	%		50	%	88.882.600	0,83	0,22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	12	Pelaku usaha	400.000.000	25	Pelaku usaha	88.882.600	12	Pelaku Usaha	86.492.000	0	Pelaku usaha		0	Pelaku usaha		25	Pelaku usaha	88.882.600	2,08	0,22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05.2.01.04	misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku usaha	300.000.000	1	Pelaku usaha	73.284.225	10	Pelaku Usaha	72.850.000	0	Pelaku usaha		0	Pelaku usaha		1	Pelaku usaha	73.284.225	0,25	0,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	3	Produk	100.000.000	30	Produk	15.598.375	5	Produk	13.642.000	0	Produk		0	Produk		30	Produk	15.598.375	10,00	0,16	Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	85,55	%	585.000.000	135,02	%	151.877.020	85,55	%	246.280.800	2,33	%	14.304.014	2,33	%	14.304.014	137	%	166.181.034	1,61	0,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	8611	UTTP	585.000.000	8761	UTTP	151.877.020	8555	UTTP	246.280.800	199	UTTP	14.304.014	199	UTTP	14.304.014	8960	UTTP	166.181.034	1,04	0,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	9800	Unit	200.000.000	8761	UTTP	111.922.000	8555	Unit	202.450.800	199	Unit	9.689.407	199	Unit	9.689.407	8960	Unit	121.611.407	0,91	0,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	750	orang	285.000.000	659	orang	41.063.600	750	orang	43.830.000	48	orang	4.614.607	48	orang	4.614.607	707	orang	45.678.207	0,94	0,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11=7+10			12=11/6		13
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	58,44	%	2.500.000.000	77,5	%	586.883.120	58,44	%	491.673.550	0	%	9.229.214	0	%	9.229.214	78	%	596.112.334	1,33	0,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri**	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	47	UMKM	2.500.000.000	85	UMKM	586.883.120	100	UMKM	491.673.550	0	UMKM	9.229.214	0	UMKM	9.229.214	85	UMKM	596.112.334	1,81	0,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	47	UMKM	2.500.000.000	101	UMKM	586.883.120	100	UMKM	491.673.550	0	UMKM	9.229.214	0	UMKM	9.229.214	101	UMKM	596.112.334	2,15	0,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan																								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
																					Rata-rata capaian kinerja		1,67	**0,78**	
																					Predikat		**Sangat Tinggi**	**Sedang**	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai	Capaian Kinerja Terrealisasi Pada Tribulan 2	Nilai SAKIP Belum keluar
Program Perencanaan dan pembangunan industri	0%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai	Capaian Kinerja Terrealisasi Pada	Capaian Kinerja Belum Tercapai

	Tribulan 2	
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	22,72%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai Target	Capaian Kinerja Terrealisasi Pada Tribulan 3	Capaian Kinerja Belum Tercapai
Melaksanakan Pengawasan operasional Industri dan monev kepatuhan Pelaporan Industri pada aplikasi SIINas		
Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional	25%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Capaian Kinerja Terrealisasi Pada Tribulan 2 dan 4	Capaian Kinerja Belum Tercapai
Pengumpulan Data Industri telah di lakukan secara kontinu ke dalam database direktori IKM dan Laporan Pendataan IKM Pada Akhir tahun		
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	2,72%	
Faktor Penyebab Pelaksanaan	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil Melaksanakan Tera dan tera ulang dengan mendatangi pemilik UTTP
Target Belum Tercapai	Pelaksanaan sampai dengan tribulan 1 , dan akan terus dilaksankan pada tribulan 2 -4	Target Belum Tercapai
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai		
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target	Kebijakan yang

	Renstra PD	diambil
Target Belum Tercapai	Belum Tercapai karena pelaksanaan Kegiatan ditribulan 2-4	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	31,25%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Tribulan 3 dan 4	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8,89%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai	Kegiatan pada tribulan 2	
Program Pengembangan Ekspor	0%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Belum Tercapai	Kegiatan Dilaksanakan pada tribulan 3	

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (SILPPD) 2020 - 2023

No.	Indikator IKK	Target RenstraPerangkat Daerah						RealisasiCapaian					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan												
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten	0,49%	1,87%	1,97%	2,01%	2,2	2,3	0,49%	1,97%	2,00%	0,96%	2,1%	0,51%
2	Persentase Terselesaikanya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,0%	90%	90%	90%	93,97	93,97	82,01%	95,83%	96.35%	61,33	81,96%	33,22%
5.	Persentase alat-alat	88,30%	85,00	85,55	86,11	85,55	85,00	63,52%	47,39%	53,32%	64,20%	89,12%	4.09%

	ukur, takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku												
6.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah Kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	94%	100%	0%

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) SAKIP 2018 - 2021

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Persentase IKM yang terstandarisasi			15,97	18,50	18,90	19,60	20,30	21,06	15,97	18,13	19,14	19,67	
2	Persentase Pertumbuhan usaha Industri			1,57	1,67	1,77	1,87	1,97	2,00	1,57	1,62	1,70	1,97	
3	Persentase Pertumbuhan IKM berbasis Produk Lokal			6,16	6,28	6,38	6,48	6,58	6,68	6,16	6,20	5,51	6,55	
4	Volume Usaha Perdagangan dalam Negeri			1,24	5,76	5,78	5,80	5,82	5,84	1,20	5,70	5,69	5,82	
5	Nilai Ekspor			43	45	47	49	51	53	45	48	38	50,1	

Tabel 2.6

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 dan TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	1,97%	2,00	101,52	2.01	2,05	101,99
		Persentase Hasil Pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah	73,68%	75,00	101,79	75,00	76,47	101,96
2.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Fasilitasi izin usaha perdagangan	90,00%	91,30	101,44	90,00	100	111,11
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90,00%	98,38	109,31	90,00	96,44	107,16
		Presentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,98%	6,57	109,87	6,00	6,03	100,5
		Presentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlemhkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85,55%	53,32	62,33	86,11	55,28	64,20

Tabel 2.7
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun (2021-2023)

(Sebelum Perubahan)

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Meningkatnya volume usaha sektor Industri dan Perdagangan	1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	5,30	10,64	10,69	11,80	10,71	16,93	5,20	6,67
		2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,96	9,96	10,01	5,40	8,26	10,62	5,77	4,90
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor industri	1	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	1,87	1,97	2.01	2,1	1,98	2,00	2,05	2,15
2	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	3	Persentase Peningkatan volume usaha perdagangan	5,79	5,98	6,00	6,1	5,82	6,57	6,30	6,03

Tabel 2.8
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun (2021-2023), serta tahun 2025

(Sesudah Perubahan)

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Meningkatnya Daya saing Industri dan Perdagangan	1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)sektor industri (*)	5,10	5,15	5,20	5,76	6,32	6,03	11,69	5,20	6,67	-
		2	Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor perdagangan (*)	5,25	5,30	5,77	6,27	6,77	5,34	5,27	5,77	4,90	-
1.	Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri	1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi sektor industri	1.90	1,97	2,01	2,10	2,2	1,95	2,00	2,05	2,15	0,51

2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Perdagangan	1	Persentase Peningkatan omzet sektor Perdagangan	1,05	1,10	1,18	1,68	2,18	1,7	1,53	2,05	2,05	0,13

Untuk Realisasi Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor industri Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor perdagangan ketersediaan datanya di awal tahun setelah tahun berkenaan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya sumber daya industri daerah
c. Belum terbentunya sentra industri
d. Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri
e. Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri
f. Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap perdagangan dan peningkatan produk
g. Belum tertibnya Penataan toko modern
h. Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang
i. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat
j. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Bidang Perindustrian

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian pula dengan industri kecil semakin

berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/MIND/PER/6/2008. Melalui beberapa program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.Perkembangan usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel. 2.6

Tabel 2.6
Jumlah Industri Formal dan Non Formal Tahun 2020-2024

Jenis Data						
a. Industri Non Formal						
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Unit usaha	15.428	15.451	15.493	16.268	16.280
2	Tenaga Kerja	44.236	44.280	44.374	44.424	44.486
3	Nilai Produksi	1.887.993.501	1.888.393.501	1.889.343.501	1.889.893.501	1.892.539.352
4	Nilai Investasi	566.398.050	566.518.050	566.803.050	566.968.050	567.761.806
b. Industri Formal						
1	Unit usaha	1.331	1.327	1.369	1.530	1.563
2	Tenaga Kerja	17.702	17.724	17.812	18.520	18.890
3	Nilai Produksi	4.352.363.664	4.456.560.899	4.580.606.499	4.710.106.499	4.846.060.648
4	Nilai Investasi	1.305.709.099	1.336.968.270	1.374.181.950	1.413.031.950	1.453.818.194

2. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2017-2020 seperti pada table 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Nilai Ekspor

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Ekspor	43.980.029.708	38.640.852.988	50.100.000.000	16,651.815.394,76	9.450.480.000.000

Sumber Data BPS Kabupaten Nganjuk.

3. Bidang Metrologi

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Anak Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP meliputi :

Tabel 2.8

RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDRAT YANG DIMILIKI

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
1	Meter Kayu	Komparator sidang 1m / 1m
2	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (Termasuk Timbangan Jembatan Maksimum Kapasitas 5 Ton)	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Anak Timbangan Kelas M2 (2 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (5 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (10 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (20 Kg) - Anak Timbangan Lemping sampai dengan 110 kg - Anak Timbangan Bidur M2 20kg (25 buah)
3	Timbangan Pegas	
4	Timbangan Cepat	
5	Timbangan Cepat Meja	
6	Neraca	
7	Dacin	
8	Timbangan Milisimal	
9	Timbangan Sentisimal	

10	Timbangan Desimal	
11	Timbangan Bobot Ingsut	
12	Timbangan Meja Beranger	
13	Anak Timbangan sebagai Perlengkapan Timbangan Neraca, dan Meja	- Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.01 g - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.001g
14	Pompa Ukur BBM	- Bejana ukur 5L, 10L, 20L - Gelas ukur 1000ml/10ml - penyipat datar - Landasan bejana ukur - Stopwatch - thermometer

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2016-2022 adalah seperti pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Jumlah UTTP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UTTP	15.245	11.373	9.597	9.653	8.761

4. Bidang Pasar

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/luar,bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan

Pasar tahun 2017-2022 adalah seperti pada tabel 2.10 berikut terlampir

TABEL 2.10

REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KEBERSIHAN TAHUN 2020 – 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Bedag tepi /luar	Rp	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80	1.583.084.763,46	1.670.786.062,65	2.371.835.545,50
2	Bedag dalam	Rp	538.914.661,00	736.691.800,00	1.094.309.400,00	1.235.094.000,00	1.795.194.600,00
3	Bedag dalam los	Rp	491.850.900,00	615.613.400,00	726.525.000,00	817.149.500,00	1.168.829.000,00
4	Di bawah Los	Rp	495.770.220,00	689.486.000,00	971.666.900,00	1.118.463.400,00	1.591.462.850,00
5	Pelataran	Rp	127.723.150,00	178.237.200,00	191.854.100,00	201.250.400,00	330.201.200,00
6	Ijin tempat	Rp	245.169.334,48	256.731.475,76	250.701.439,33	248.750.166,18	-
7	Penitipan kendaraan	Rp	116.375.000,00	172.444.000,00	164.032.500,00	199.653.000,00	318.184.800,00
8	Ternak	Rp	47.832.500,00	64.899.000,00	151.842.500,00	199.479.000,00	275.322.500,00
9	BBN (Bea Balik Nama)	Rp	16.739.306,00	46.376.060,00	27.773.421,00	34.611.237,00	1.906.030,00
10	Kebersihan	Rp	185.508.000,00	252.608.000,00	258.528.600,00	291.490.100,00	719.045.600,00
JUMLAH		**Rp**	**3.431.114.547,15**	**4.611.429.089,56**	**5.420.318.623,79**	**6.016.726.865,83**	**8.571.982.125,50**

2.3.3.1. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya jumlah pelaku usaha industri yang berdaya saing	Pelaku usaha industri masih bersifat konvensional	Manajemen usaha dan peralatan yang digunakan bersifat tradisional
		Standarisasi produk yang belum sesuai dengan SNI	Rendahnya kesadaran pelaku usaha industri terhadap legalitas produk
		Kurang optimalnya informasi produk unggulan potensi daerah	Kurangnya/rendahnya pengetahuan pelaku usaha industri tentang pemasaran
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran antar daerah	Rendahnya pengetahuan dan sarana prasarana pelaku usaha industri terhadap teknologi
2	Belum tertibnya pelaku usaha industri dalam melakukan usahanya	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian (Monev) yang dilakukan	Minimnya kompetensi SDM pelaksana sektpr industri
			Terbatasnya jumlah personil pelaksana sektor industri
		Rendahnya ketaatan pelaku usaha industri sesuai dengan perundangan yang berlaku	Belum optimalnya pengetahuan tentang ketaatan dan kewajiban pelaku usaha industri
3	Jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilayani belum maksimal	1. Masih rendahnya kepatuhan pemilik UTTP dalam melakukan tera/tera ulang sebagai wujud dari perlindungan konsumen . 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanan tera /tera belum memadai. 3. Pengawasan pada	1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tera/tera ulang. 2. Tidak memadainya sarana berupa mobil layanan tera/tera ulang. 3. Tidak adanya tenaga pengawas yang sudah bersertifikat

		UTTP yang sudah di tera/tera ulang dan BDKT yang sesuai dengan aturan masih belum optimal	
4	Penataan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	1. Sarana dan Prasarana distribusi Perdagangan belum memadai 2. Belum optimalnya Pengelolaan Pembayaran Retribusi 3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang	Tidak memadainya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Pengelolaan Pembayaran Retribusi Belum dilaksanakan Secara Elektronik Pengelolaan masih dilaksanakan secara tradisional
5	Harga ditentukan Pedagang/pasar	Belum dapat menstabilisasi harga barang pokok dan barang Penting	Belum Optimalnya Pelaksanaan Operasi Pasar
7	Belum siapnya Produk yang siap diekspor	Kreteria Produk belum memenuhi syarat	Belum Profesionalnya Pelaku Usaha
8	Belum Optimalnya Penataan toko modern	Sudah adanya Pelaku Usaha yang sudah beroperasional sesuai dengan peraturan	Tidak berkembangnya pasar rakyat karena Belum Optimalnya Penertiban berdirinya toko modern

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air khususnya penanganan banjir perkotaan, lingkungan hidup dan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " **Meningkatnya Produktifitas sektor Industri dan perdagangan"**

adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan Perdagangan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	Target 2025
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sektor industri dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor industri	%	11.90
				Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor Perdagangan	%	5,50
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	2,2
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	2	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	%	6,2

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 terdiri dari program-program yang menunjang visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Program ini mencakup urusan Perindustrian dan Perdagangan serta program-program penunjang

1.1 BIDANG PERINDUSTRIAN

1.1.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan menengah Melalui Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri, fasilitasi sarana dan Prasarana bagi Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat

1.1.2 Program Pengendalian Izin usaha Industri

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINAS

1.1.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI melalui Pengumpulan, Pengolahan, analisis Data Industri, Diseminasi dan Publikasi data informasi serta Pemantaun dan Evaluasi kepatuhan Industri

1.2 BIDANG PERDAGANGAN

1.2.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Pengajuan Rekomendasi teknis izin Penerbitan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan Minuman

beralkohol Golongan B dan C serta Pengendalian fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan

1.2.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Jumlah Sarana dan prasarana Pasar yang difasilitasi serta Pembinaan terhadap Pengelola Pasar.

1.2.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalahPersentase Pengawasan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaa, PengendalianHarga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi.

1.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Peningkatan fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor melalui Penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor.

1.2.5 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Alat - alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku serta Pengawasan.

1.2.6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri. Melalui Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**24.150.439.760,00**	**17.794.569.055,00**	**17.260.799.545,00**	**-6.889.640.215,00**							**21.837.595.606,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**24.150.439.760,00**	**17.794.569.055,00**	**17.260.799.545,00**	**-6.889.640.215,00**							**21.837.595.606,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**10.221.370.391,00**	**6.294.286.350,00**	**6.444.660.750,00**	**-3.776.809.641,00**							**8.433.779.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan**				**90 %**	**90 %**	**179.380.000,00**	**51.006.000,00**	**39.843.000,00**	**-20.601.000,00**							**158.779.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diproses*				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	16.050.000,00	7.375.000,00	-22.625.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	16.050.000,00	7.375.000,00	-22.625.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Prosentase penerbitan TDG*				90 %	90 %	98.890.000,00	34.956.000,00	32.468.000,00	-66.422.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		108.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				25 Dokumen	25 Dokumen	98.690.000,00	34.956.000,00	32.468.000,00	-66.422.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			108.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-				-	-	26.390.000,00	0,00	0,00	-26.390.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Warslaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				2 Dokumen	0 Dokumen	16.390.000,00	0,00	0,00	-16.390.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*Jumlah rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik luar negeri*				2 Dokumen	2 Dokumen	13.750.000,00	0,00	0,00	-13.750.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri																		
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				2 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 dokumen	0 dokumen	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah rekomendasi Teknis izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				2 Dokumen	0 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Omzet perdagangan**				**1089 milyar**	**1089 milyar**	**9.078.934.041,00**	**5.286.053.000,00**	**5.716.000.400,00**	**-1.928.934.041,00**							**7.150.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				8 unit	6 unit	8.478.996.841,00	5.012.284.000,00	5.473.884.400,00	-3.005.112.441,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat		6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	8.478.996.841,00	5.012.284.000,00	5.473.884.400,00	-3.005.112.441,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan*				35 pasar	35 pasar	599.937.200,00	273.769.000,00	242.116.000,00	-357.821.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	599.937.200,00	273.769.000,00	242.116.000,00	-357.821.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk**				**96 %**	**96 %**	**180.000.000,00**	**132.781.000,00**	**95.188.000,00**	**95.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*jumlah laporan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota*				4 laporan	4 laporan	110.000.000,00	61.031.000,00	57.538.000,00	-52.462.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	36.526.000,00	30.233.000,00	-19.767.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	24.505.000,00	27.305.000,00	-32.695.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	71.750.000,00	37.650.000,00	-32.350.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	71.750.000,00	37.650.000,00	-32.350.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor**				**60 %**	**60 %**	**94.352.000,00**	**86.492.000,00**	**38.854.000,00**	**55.648.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di fasilitasi*				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	94.352.000,00	86.492.000,00	38.854.000,00	-55.498.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	72.850.000,00	72.850.000,00	32.133.000,00	-40.717.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				5 Produk	5 Produk	21.502.000,00	13.642.000,00	6.721.000,00	-14.781.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku**				**85,55 %**	**85,55 %**	**258.280.800,00**	**246.280.800,00**	**297.210.800,00**	**-8.280.800,00**							**250.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan*				8555 UTTP	8555 UTTP	258.280.800,00	246.280.800,00	297.210.800,00	38.930.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pemilik UTTP		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8555 Unit	8555 Unit	214.450.800,00	202.450.800,00	259.257.800,00	44.807.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				750 Orang	750 Orang	43.830.000,00	43.830.000,00	37.953.000,00	-5.877.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk**				**58,44 %**	**58,44 %**	**430.423.550,00**	**491.673.550,00**	**257.464.550,00**	**19.576.450,00**							**450.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri*				45 UMKM	45 UMKM	430.423.550,00	491.673.550,00	257.464.550,00	-172.959.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	UMKM		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				100 UMKM	100 UMKM	430.423.550,00	491.673.550,00	257.464.550,00	-172.959.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**13.929.069.369,00**	**11.500.282.705,00**	**10.816.238.795,00**	**-3.112.830.574,00**							**13.403.816.606,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan**				**85,30 Nilai**	**85,30 Nilai**	**12.954.069.369,00**	**10.978.629.705,00**	**10.222.642.795,00**	**-305.252.763,00**							**12.648.816.606,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				17 Dokumen	17 Dokumen	179.172.718,00	49.094.590,00	30.896.000,00	-148.276.718,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	17 Dokumen	109.556.388,00	37.918.000,00	23.926.000,00	-85.630.388,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37.643.790,00	6.754.350,00	4.524.000,00	-33.119.790,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	31.972.540,00	4.422.240,00	2.446.000,00	-29.526.540,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				104 Dokumen	104 Dokumen	8.839.925.000,00	8.824.089.118,00	8.196.410.760,00	-643.514.240,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		9.972.816.606,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	8.723.925.000,00	8.766.213.118,00	8.142.527.760,00	-581.397.240,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			9.850.816.606,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	51.000.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	-1.020.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			52.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.632.000,00	1.316.000,00	-8.684.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	25 Laporan	55.000.000,00	5.264.000,00	2.587.000,00	-52.413.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	17.652.000,00	6.826.000,00	5.882.000,00	-11.770.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18 Laporan	1 Laporan	17.652.000,00	6.826.000,00	5.882.000,00	-11.770.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	289.310.000,00	0,00	0,00	-289.310.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				254 Paket	0 Paket	139.310.000,00	0,00	0,00	-139.310.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.162.513.718,00	952.864.980,00	759.828.030,00	-402.685.688,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		970.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.998.400,00	8.998.400,00	8.998.400,00	-1.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Persalan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	154.182.518,00	0,00	72.100.000,00	-82.062.518,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	108.004.000,00	60.958.180,00	60.496.430,00	-47.507.570,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	534.231.300,00	635.743.800,00	482.635.200,00	-51.596.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	1 Laporan	43.892.500,00	29.062.500,00	23.250.000,00	-20.642.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1 Laporan	303.225.000,00	212.102.000,00	106.348.000,00	-196.877.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 unit	12 unit	1.298.347.533,00	321.174.005,00	345.525.255,00	-952.822.278,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	dinas Perindustrian dan Perdagangan		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	663.728.400,00	0,00	0,00	-663.728.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	140.556.850,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-133.356.850,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	13 Unit	494.062.283,00	313.974.005,00	338.325.255,00	-155.737.028,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	419.976.000,00	648.239.812,00	600.953.000,00	180.977.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		486.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	306.000.000,00	381.907.812,00	345.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	108.976.000,00	261.332.000,00	250.053.000,00	141.077.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				7 unit	7 unit	747.172.400,00	176.341.200,00	283.147.750,00	-464.024.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara		535.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.650.400,00	64.620.000,00	64.620.000,00	-36.030.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	21 Unit	93.076.200,00	79.176.200,00	79.171.750,00	-13.904.450,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15 Unit	9.990.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-4.995.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	112 Unit	27.550.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.033.000,00	0,00	106.811.000,00	-193.222.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	215.872.800,00	0,00	0,00	-215.872.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun**				**57 %**	**57 %**	**745.000.000,00**	**323.355.000,00**	**457.170.000,00**	**-170.000.000,00**							**575.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				7 Dokumen	7 Dokumen	745.000.000,00	323.355.000,00	457.170.000,00	-287.830.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah		575.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	105.000.000,00	56.220.000,00	103.330.000,00	-1.670.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	230.000.000,00	103.450.000,00	336.280.000,00	106.280.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	85.000.000,00	127.890.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	35.795.000,00	17.560.000,00	-22.440.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas**				**79 %**	**79 %**	**130.000.000,00**	**63.972.000,00**	**33.358.000,00**	**-60.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penerbitanizin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota*				33 Dokumen	33 Dokumen	130.000.000,00	63.972.000,00	33.358.000,00	-96.642.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi				7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	63.972.000,00	33.358.000,00	-36.642.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			kewenangan pemerintah pusat																	
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase pengelolaan data dalam SIINas**				**25 %**	**25 %**	**100.000.000,00**	**134.326.000,00**	**103.068.000,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	134.326.000,00	103.068.000,00	3.068.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	43.536.000,00	41.898.000,00	-18.102.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	90.790.000,00	61.170.000,00	21.170.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 2 Prov - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	JUMLAH								**24.150.439.760,00**	**17.794.569.055,00**	**17.260.799.545,00**	**-6.889.640.215,00**							**21.837.595.606,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001